

Dampak Pengeluaran Pemerintah dan Wisatawan serta Investasi Swasta Terhadap Kinerja Perekonomian Bali: Pendekatan Social Accounting Matrix

✓ ✓
Made Antara

Abstract

Bali's economic development is heavily based on agriculture, tourism and industry. While other part of the Indonesia economy were suffering due to economic down turn since the middle of 1997, Bali's economy seems less affected. The performance of Bali's economy was analyzed employing 1996 Social Accounting Matrix (SAM), constructed based on 55x55 accounts. It is assumed that this 1996 SAM could represent the current situation of Bali's economy.

The impact of increased of expenditures on economic infrastructure, without increased in total government expenditure, on the of Bali's economic performance was relatively low. While increased allocation of expenditure on social infrastructure or public services without increase in total government expenditure would deteriorate substantially the performance of Bali's economy.

Maintaining the government expenditure for development as in 1996 levels, would enhanced the performance of Bali's economy.

The study also shows that an increase in tourist expenditure without effort to increase the government expenditure would affect the income distribution among household group towards more inequality. But, increase tourist expenditure as well as government expenditure would promote better income distribution.

1. PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi Bali yang memprioritaskan pada sektor pertanian dalam arti luas, sektor pariwisata, serta sektor industri kecil dan kerajinan telah menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang fantastic. Pertumbuhan dalam pelita I rata-rata 7,32 persen per tahun, pelita II sebesar 8,55 persen, pelita III sebesar 14,01 persen, pelita IV sebesar 8,28 persen, dan pelita V mencapai 8,40 persen dari target 6,30 % (Anonim, 1994). Sedangkan pertumbuhan tiga tahun pelita VI (1994-1996), berturut-turut 7,51 persen, 7,93 persen, dan 8,16 persen menurut harga konstan tahun 1993 (Anonim 1997).

Pertumbuhan perekonomian Bali yang relatif tinggi sejak Pelita I sampai tahun 1996 dicapai melalui alokasi investasi yakni, pengeluaran pemerintah (*government expenditure, G*) dan investasi swasta (*private investment, I*). Jadi pengeluaran pemerintah pusat dan daerah (APBN, APBD, Inpres-Inpres) untuk membiayai pembangunan sektor-sektor, pada hakekatnya bertujuan untuk mempengaruhi perekonomian yakni, mendorong pertumbuhan perekonomian regional, meningkatkan pendapatan masyarakat dan memperluas kesempatan kerja. Melalui berbagai program dan proyek yang bersumber dari anggaran pusat dan daerah, pemerintah juga membangun berbagai fasilitas fisik dan ekonomi termasuk fasilitas kepariwisataan untuk mengantisipasi peningkatan kunjungan wisatawan. Peningkatan kunjungan wisatawan akan meningkatkan pengeluaran wisatawan, dan akhirnya meningkatkan efek pengganda (*multiplier effects*), perolehan devisa dan perluasan kesempatan kerja.

Jelasnya, pengeluaran pemerintah dan wisatawan serta investasi swasta berperan sebagai injeksi dana ke dalam perekonomian Bali. Namun, krisis yang melanda perekonomian nasional sejak Agustus 1997 yang berlanjut sepanjang 1998 telah menurunkan penerimaan pemerintah, yang akhirnya menurunkan kemampuan (pengeluaran) pemerintah untuk membiayai pembangunan sektor-sektor ekonomi. Demikian pula, krisis keamanan yang mengikuti krisis ekonomi, telah memaksa Pemda. Bali menurunkan target kunjungan wisatawan dari 10 persen menjadi 5 persen, yang tentunya juga menurunkan target total pengeluaran wisatawan di Bali. Fenomena ini sudah pasti berpengaruh terhadap kinerja perekonomian Bali.

1.1. Studi-Studi Terdahulu

Arief (1993) menunjukkan kelemahan metode input-output (I-O) yang dikembangkan oleh Leontief dan Hoffenberg untuk menaksir dampak perubahan pengeluaran pemerintah terhadap output dan penyerapan tenaga kerja di AS. Metode ini tidak diformulasikan untuk menaksir dampak perubahan pengeluaran pemerintah terhadap aspek-aspek makro lainnya, seperti pendapatan faktor-faktor produksi, distribusi pendapatan, neraca pembayaran dan penerimaan pajak.

Studi Wuryanto (1996) menggunakan SAM *Interegional* menemukan bahwa fiskal desentralisasi dapat meningkatkan pendapatan rumahtangga regional di hampir semua propinsi, utamanya di Jawa. Namun peningkatan pendapatan rumahtangga di luar Jawa yang awalnya rendah, cenderung menimbulkan ketidakmerataan pendapatan dibandingkan skenario aktual. Hasil studi lainnya yaitu, penyusunan fiskal terdesentralisasi menghasilkan output nasional lebih besar dari pada skenario aktual lainnya. Sedangkan Budiyantri dan Schreiner (1991) menerapkan SAM pada data PATANAS 1988 menemukan bahwa SAM bermanfaat dalam menganalisis sumber-sumber dan distribusi pendapatan antar sistem usahatani (tanaman dan ternak), daerah-daerah produksi, buruh tani, dan tenaga kerja wanita.

Ratnawati (1996) melakukan kajian menggunakan pendekatan *Computable General Equilibrium* (CGE) menemukan bahwa peningkatan tarif impor meningkatkan kinerja perekonomian Indonesia yang ditunjukkan oleh kenaikan *Real Gross Domestic Product* (RGDP). Namun penurunan tarif impor ternyata menurunkan nilai tukar rupiah terhadap dolar, karena diperlukan dolar lebih banyak untuk membiayai impor. Penurunan tarif impor mengakibatkan investasi dalam negeri mengalami penurunan karena sebagian besar kebutuhan bahan penolong dan modal dapat diperoleh dari luar negeri.

Studi-studi ekonomi regional dengan menggunakan SAM masih relatif terbatas. Perekonomian Bali dengan karakteristik pariwisatanya, belum pernah didekati dengan model SAM. Sedangkan, untuk mengetahui peranan atau dampak sektor pariwisata terhadap perekonomian Bali, Erawan (1994) menganjurkan menggunakan analisis input-output (I-O) sepanjang tersedia tabel I-O yang diperoleh dengan metode survei. Namun perlu diingat bahwa model I-O memiliki

keterbatasan yaitu: (1) tidak mampu menjelaskan distribusi pendapatan institusional, (2) efek pengeluaran wisatawan terhadap sektor-sektor produksi, dan (3) dampak perubahan pengeluaran pemerintah atau wisatawan terhadap pertumbuhan dan distribusi pendapatan. Sedangkan dalam rancangbangun SAM dapat dimasukkan institusi wisatawan.

Bertolak dari latar belakang masalah, hasil studi terdahulu dan keterbatasan model I-O yang hanya memeragakan sektor produksi, keterbatasan data harga-harga serta data makroregional lainnya jika menggunakan *Computable General Equilibrium* (CGE), maka penggunaan kerangka analisis SAM untuk mengkaji dampak pengeluaran pemerintah dan wisatawan, serta investasi swasta terhadap kinerja perekonomian Bali layak dilakukan.

2. METODOLOGI

2.1. Pendekatan SAM

Social accounting matrix (SAM) merupakan suatu kerangka data yang disusun dalam bentuk matriks yang merangkum berbagai variabel sosial-ekonomi secara kompak dan terintegrasi sehingga dapat menyajikan gambaran umum perekonomian suatu negara atau daerah pada suatu waktu tertentu (King, 1985; Pyatt dan Round, 1985; BPS, 1994). Penggunaan SAM lainnya adalah untuk analisis pengganda, studi distribusi pendapatan, simulasi dampak kebijakan, masukan model *Computable General Equilibrium*, CGE (Thorbecke, 1985).

Bentuk dasar kerangka *Social Accounting Matrix* (SAM) adalah matriks ukuran 4x4, tetapi masing-masing elemen matriks ini terdiri atas submatriks (subsistem). Lajur ke samping (baris) menunjukkan penerimaan/pendapatan, sedangkan lajur ke bawah (kolom) menunjukkan pengeluaran. Dalam SAM berlaku ketentuan bahwa total penerimaan (total baris) harus sama dengan total pengeluaran (total kolom). Dalam kerangka SAM seperti disajikan pada Diagram 1 terdapat 4 neraca utama yaitu, (1) faktor produksi, (2) institusi, (3) sektor produksi, dan (4) neraca lainnya (*rest of the world*).

Vektor kolom, yaitu nilai-nilai x_i yang muncul dalam kolom 4 mewakili injeksi (*injections*), diasumsikan ditentukan secara eksogenus, misalnya arus transfer/pengeluaran pemerintah (pusat, daerah), transfer

dari luar negeri ke rumahtangga dan perusahaan, investasi dan ekspor. Sedangkan vektor baris (li) dalam baris 4 mewakili kebocoran (*leakages*), misalnya pajak langsung dan tak langsung, tabungan, impor, dan transfer pendapatan ke luar negeri. Tiga neraca lainnya (faktor, institusi, dan aktivitas produksi) diasumsikan ditentukan secara endogenus.

Dalam praktek penyusunan tabel SAM, pemecahan masing-masing neraca tergantung pada tujuan studi dan ketersediaan data. Dengan demikian, penting mengenali seperangkat neraca-neraca mendekati minimum yang diperlukan untuk menggambarkan sebuah sistem perekonomian.

Diagram 1
Penyederhaan Kerangka Social Accounting Matrix (SAM)

Pengeluaran		Neraca Endogen			Neraca Eksogen (Injection)	Total (penerimaan)	
		Faktor Produksi	Institusi	Sektor Produksi			
		Penerimaan	1	2	3	4	5
Neraca Endogen	Faktor Produksi	1	0	0	T1.3	x1	y1
	Institusi	2	T2.1	T2.2	0	x2	y2
	Produksi	3	0	T3.2	T3.3	x3	y3
Neraca Eksogen (Leakage)		4	I'1	I'2	I'3	r	yx
Total (Pengeluaran)		5	y'1	y'2	y'3	y'x	

2.2. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan pendekatan SAM, dan untuk mengkonstruksi SAM Bali 1996, diperlukan beberapa jenis data sekunder antara lain: I-O Bali 1996, Survei Sosial Ekonomi Nasional 1996, Survei Khusus Tabungan dan Investasi Rumahtangga 1996, survei perusahaan industri, berbagai pengeluaran pemerintah, data kepariwisataan, dan lain-lain. Sumber data yaitu, Badan Pusat Statistik Jakarta, Kantor Statistik Propinsi Bali, Bappeda Propinsi Bali, dan instansi lainnya lingkup Pemda Bali.

2.3. Penyusunan Tabel SAM

SAM Bali 1996 yang disusun terdiri atas: 2 neraca faktor, yaitu tenaga kerja dan modal; 14 neraca institusi yang terdiri atas 1 neraca perusahaan, 12 neraca pemerintah, 1 neraca wisatawan; 28 neraca produksi yang terdiri atas 15 neraca yang berhubungan dengan pertanian, 1 neraca pertambangan dan penggalian, 7 neraca yang berhubungan dengan industri pengolahan termasuk sektor industri kecil, dan 5 neraca yang berhubungan dengan jasa-jasa; 6 neraca eksogen. Jumlah seluruh neraca sebanyak 55. Dengan menggunakan data yang tersedia, maka dilakukan pengisian sel-sel neraca, dan selanjutnya dilakukan penyesuaian untuk mencapai keseimbangan antar kolom dan baris. Pada tahap ini Tabel SAM sudah mampu mendeskripsi perekonomian regional Bali.

2.4. Metode Analisis

Diagram 1 dapat diformulasikan dalam bentuk persamaan simultan yakni;

$$\begin{aligned} y_1 &= \quad \quad \quad + A_{13}y_3 + x_1 \\ y_2 &= A_{21}y_1 + A_{22}y_2 \quad \quad + x_2 \\ y_3 &= \quad \quad \quad A_{32}y_2 + A_{33}y_3 + x_3 \end{aligned}$$

Bila ketiga persamaan di atas ditulis dalam bentuk matriks perkalian, akan menjadi;

$$\begin{vmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \\ y_1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 0 & 0 & A_{13} \\ A_{21} & A_{22} & 0 \\ 0 & A_{32} & A_{33} \\ 0 & A & 0 \end{vmatrix} \begin{vmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \\ y_1 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_i \end{vmatrix}$$

$$y_i = A y_i + x_i$$

$$y_i - A y_i = x_i$$

$$(1 - A) y_i = x_i$$

$$y_i = (1 - A)^{-1} x_i$$

$$y_i = M a x_i$$

dimana:

y_1 = pendapatan faktor produksi;

y_2 = pendapatan institusi;

y_3 = pendapatan sektor produksi (output);

y_i = vektor kolom pendapatan neraca ke-i (49×1)

A_{ij} = matriks koefisien pengeluaran rata-rata (*average expenditure propensity*)

x_i = vektor kolom neraca eksogen (injeksi) ke-i (49×1)

$M_a = (1 - A)^{-1}$ = matriks pengganda (multiplier) SAM Bali (49×49)

$T_{1.3} = A_{13}y_3$; $T_{2.1} = A_{21}y_1$; $T_{2.2} = A_{22}y_2$; $T_{3.2} = A_{32}y_2$; $T_{3.3} = A_{33}y_3$

Simulasi difokuskan pada kombinasi tiga variabel eksogen utama yaitu pengeluaran pemerintah dan wisatawan, serta investasi swasta dilihat dampaknya terhadap pertumbuhan dan distribusi pendapatan neraca-neraca regional, atau kinerja perekonomian Bali. Jadi simulasi mencakup 4 kelompok dan 15 skenario.

3. HASIL

Suatu analisis pengganda, bagaimanapun, hanya dapat menangkap efek variabel eksogen dalam pengertian relatif. Untuk menangkap dalam hal absolut (riil), maka simulasi mewakili keadaan tersebut dan harus dikerjakan.

3.1. Kelompok I: Pengeluaran Pemerintah dan Wisatawan Tetap, hanya Alokasi Pengeluaran untuk Infrastruktur Berubah

Peningkatan alokasi untuk infrastruktur ekonomi 15 persen (S1) tanpa meningkatkan total pengeluaran pemerintah, secara hakiki adalah bernuansa pertumbuhan, berdampak menumbuhkan ekonomi Bali¹ hanya 0,05 persen, pendapatan rumahtangga rata-rata 0,05 persen, sektor produksi rata-rata 0,09 persen, dan khususnya sektor produksi pertanian 0,10 persen (Lampiran 1).

1. Pertumbuhan ekonomi Bali yang dimaksud adalah pertumbuhan ekonomi dari sisi pendapatan, yaitu rata-rata pertumbuhan pendapatan (nilai tambah) faktor produksi tenaga kerja dan modal PDRB *at factor cost*.

Peningkatan alokasi untuk infrastruktur sosial 15 persen (S2) atau pelayanan umum 15 persen (S3) tanpa meningkatkan total pengeluaran pemerintah, secara hakiki adalah bernuansa pemerataan. Hasil simulasi menunjukkan bahwa kedua skenario ini berekses menurunkan kinerja perekonomian Bali, baik menurunkan pertumbuhan nilai tambah faktor produksi, pendapatan rumahtangga, maupun pendapatan sektor produksi. Beberapa sektor yang menurun relatif tinggi yaitu, pertambangan/penggalian masing-masing -0,38 persen dan -1,40 persen, bangunan/konstruksi masing-masing -0,47 persen dan -1,73 persen. Namun peningkatan alokasi infrastruktur sosial lebih rendah menurunkan kinerja perekonomian Bali dari pada peningkatan alokasi pelayanan umum (Lampiran 1).

3.2. Kelompok II: Pengeluaran Pemerintah Tetap, Pengeluaran Wisatawan dan Investasi Swasta Meningkat

Kelompok skenario II mewakili perekonomian krisis ditandai oleh pengeluaran pemerintah yang tetap. Jika pengeluaran pemerintah tetap seperti 1996 dan pengeluaran wisatawan meningkat 5 persen (S4), akan menumbuhkan ekonomi Bali (rata-rata nilai tambah faktor) 2,66 persen. Sedangkan jika pengeluaran wisatawan meningkat 10 persen (S5), akan menumbuhkan ekonomi Bali 5,32 persen atas dasar harga faktor 1996. Namun, jika investasi swasta meningkat 15 persen (S6), akan menumbuhkan ekonomi Bali 1,51 persen (Lampiran 2). Jadi, walaupun pengeluaran pemerintah untuk pembangunan tidak meningkat, tetapi jika pengeluaran wisatawan dalam pengertian kunjungan wisatawan meningkat atau investasi swasta meningkat, maka ekonomi Bali masih mampu tumbuh positif. Hanya, dampak² peningkatan investasi 15 persen relatif lebih rendah dari pada dampak peningkatan pengeluaran wisatawan 5 persen.

Faktor produksi dimiliki oleh rumah tangga, sehingga pendapatannya harus dibagi di antara golongan rumahtangga. S4, S5, dan S6 berdampak menumbuhkan pendapatan rumahtangga masing-masing 2,644 persen, 5,29 persen dan 1,49 persen. Pada Lampiran 2 juga

2 Istilah Dampak digunakan untuk skenario yang menimbulkan pertumbuhan positif, sedangkan istilah Ekse digunakan untuk skenario yang menimbulkan pertumbuhan negatif.

tampak bahwa semakin meningkat pengeluaran atau kunjungan wisatawan (S4 dan S5), maka distribusi pendapatan antar golongan rumah tangga semakin kurang merata, yang ditunjukkan oleh semakin besarnya Standar Deviasi (SD) atau Koefisien Variasi (KV) pendapatan antar golongan rumah tangga yakni, SD dari 0,0055 pada S4 menjadi 0,0152 pada S5, atau KV dari 0,21 persen pada S4 menjadi 0,29 persen pada S5.

S4, S5 dan S6 juga mendorong pertumbuhan pendapatan sektor produksi, masing-masing 2,22 persen, 4,44 persen, dan 2,06 persen. Namun, pertumbuhan sektor produksi pertanian (dalam arti luas) relatif lebih tinggi pada S4 dan S5 masing-masing 2,25 persen dan 4,49 persen, tetapi relatif lebih rendah pada S6 sebesar 1,05 persen dari pada rata-rata pertumbuhan sektor produksi pada masing-masing skenario.

3.3. Kelompok III: Pengeluaran Pemerintah Menurun, Pengeluaran Wisatawan dan Investasi Swasta Meningkat

Kelompok skenario III juga mewakili perekonomian krisis, ditandai oleh penurunan pengeluaran pemerintah untuk pembangunan, diasumsikan menurun 15 persen dan 30 persen. Namun pengeluaran wisatawan di Bali diasumsikan menurun dari target optimistik (10%) yaitu, tetap sama seperti 1996 dan meningkat 5 persen. Di samping itu, diasumsikan juga investasi swasta meningkat 10 persen dan 15 persen dari sektor-sektor yang diinvestasi tahun 1996. Ketiga variabel yaitu, pengeluaran pemerintah, wisatawan, dan investasi swasta sama-sama memiliki dampak terhadap perekonomian Bali. Oleh karena itu, esensi skenario ini adalah untuk melihat peningkatan pengeluaran wisatawan dan investasi swasta dalam mengkompensasi penurunan pengeluaran pemerintah dan dampaknya terhadap kinerja perekonomian Bali.

1. Pengeluaran Pemerintah Menurun 15 Persen, Pengeluaran Wisatawan Tetap dan Meningkat 5 Persen serta Investasi Swasta Meningkat 10 Persen

Jika pengeluaran pemerintah menurun 15 persen dan pengeluaran wisatawan tetap seperti 1996 (S7), maka berekses menurunkan pertumbuhan ekonomi Bali -0,40 persen (Lampiran 3). Penurunan ini

disebabkan oleh menurunnya (permintaan) output sektor produksi oleh pemerintah, selanjutnya menurunkan produktivitas dan akhirnya menurunkan nilai tambah faktor produksi. Namun, jika pengeluaran pemerintah menurun 15 persen, tetapi pengeluaran wisatawan meningkat 5 persen (S8), maka berdampak menumbuhkan ekonomi Bali 2,24 persen. Pertumbuhan yang positif ini disebabkan oleh peningkatan (permintaan) output sektor produksi oleh wisatawan lebih tinggi dari pada penurunan (permintaan) output oleh pemerintah, sehingga dampak bersihnya adalah positif, dan akhirnya mampu meningkatkan nilai tambah faktor produksi yang digunakan dalam proses produksi. Sedangkan, jika pengeluaran pemerintah menurun 15 persen, tetapi investasi meningkat 10 persen (S9), maka ekonomi Bali tumbuh positif sebesar 0,60 persen.

Ekses S7 berlanjut sampai pada neraca institusi, yakni menurunkan pendapatan rumahtangga (neraca 3-7) rata-rata -0,41 persen. Namun, jika pengeluaran wisatawan meningkat 5 persen (S8), atau investasi meningkat 10 persen (S9), maka pendapatan rumahtangga tumbuh masing-masing 2,24 persen dan 0,59 persen. Dengan demikian, penurunan pendapatan rumahtangga dapat dicegah walaupun terjadi penurunan pengeluaran pemerintah 15 persen, jika dibarengi dengan peningkatan pengeluaran wisatawan atau peningkatan investasi swasta.

S7 juga bereskses menurunkan pendapatan sektor produksi sebesar -0,77 persen. Bila ekses S7 dilacak lebih jauh, dari tiga sektor utama, secara umum pendapatan sektor industri termasuk konstruksi/bangunan dan pertambangan/penggalan menurun tertinggi, kemudian diikuti oleh pertanian dan terakhir sektor jasa-jasa. Pada S8 pendapatan sektor produksi tumbuh 1,49 persen. Sedangkan sektor pertanian (dalam arti luas) pada S8 tumbuh sebesar 1,80 persen. Ini menunjukkan bahwa sektor pertanian (dalam arti luas) terkait erat dengan pariwisata. Pada S9 pendapatan sektor produksi mampu tumbuh 1,04 persen, sehingga penurunan pengeluaran pemerintah pada S7 dapat dikompensasi oleh peningkatan investasi swasta pada S9. Ini menunjukkan bahwa penurunan pertumbuhan sektor produksi karena penurunan pengeluaran pemerintah dapat dicegah jika pada waktu yang bersamaan ada peningkatan investasi sebesar 10 persen.

Secara umum, jika pengeluaran pemerintah menurun 15 persen, tetapi pengeluaran wisatawan tetap seperti 1996 (S7), berdampak

menurunkan kinerja perekonomian Bali. Sedangkan jika pengeluaran pemerintah menurun 15 persen, tetapi pengeluaran wisatawan meningkat 5 persen (S8), atau investasi swasta meningkat 10 persen, berdampak meningkatkan kinerja perekonomian Bali. Jadi pengeluaran pemerintah bukanlah satu-satunya sumber pertumbuhan, karena masih ada yang lainnya yaitu pengeluaran wisatawan atau investasi swasta sebagai mesin pertumbuhan ekonomi Bali.

Mengkaitkan hasil S7 dengan S8 dan S9, tampak bahwa eksekusi penurunan pengeluaran pemerintah 15 persen, dapat dikompensasi oleh dampak peningkatan pengeluaran wisatawan 5 persen atau investasi swasta 10 persen.

2. Pengeluaran Pemerintah Menurun 30 Persen, Pengeluaran Wisatawan Tetap dan Meningkat 5 persen, tetapi Investasi Swasta Meningkat 15 Persen

Jika pengeluaran pemerintah menurun 30 persen, tetapi pengeluaran atau kunjungan wisatawan tetap seperti 1996 (S10), maka ekonomi Bali tumbuh $-0,81$ persen (Lampiran 4). Penurunan ini masih relatif rendah dan belum mengkhawatirkan dibandingkan perekonomian Indonesia yang mengalami kontraksi sebesar $-12,23$ persen pada semester pertama tahun 1998 (lihat Kompas, Rabu, 8 Juli 1998: Ekonomi Indonesia 1998 minus 13.06 persen). Namun, jika pengeluaran wisatawan meningkat 5 persen (S11), maka ekonomi Bali tumbuh positif sebesar 1,85 persen menurut harga faktor 1996. Sedangkan jika investasi swasta meningkat 15 persen (S12), maka ekonomi Bali juga tumbuh positif sebesar 0,71 persen.

Jika pengeluaran pemerintah menurun 30 persen, tetapi pengeluaran wisatawan tetap seperti 1996 (S10), maka berekses menurunkan pertumbuhan sektor produksi $-1,45$ persen (Lampiran 4). Namun jika pengeluaran pemerintah menurun 30 persen, tetapi pengeluaran wisatawan meningkat 5 persen (S11), maka sektor produksi tumbuh 0,77 persen. Dari tiga sektor utama, kelompok sektor jasa-jasa tumbuh paling tinggi, kemudian diikuti oleh kelompok sektor pertanian, dan kelompok sektor industri tumbuh paling rendah. Jika pengeluaran pemerintah menurun 30 persen, tetapi investasi swasta meningkat 15 persen (S12), maka sektor produksi tumbuh 1,62 persen.

Mencermati pertumbuhan pendapatan faktor (pertumbuhan PDRB atas dasar harga faktor 1996), pendapatan rumahtangga, dan pendapatan sektor produksi, maka S10 berekses menurunkan kinerja perekonomian Bali, sedangkan S11 dan S12 berdampak meningkatkan kinerja perekonomian Bali. Mengkaitkan S10 dengan S11 dan S12, maka eksese penurunan pengeluaran pemerintah 30 persen dapat dikompensasi oleh dampak peningkatan pengeluaran wisatawan 5 persen (target pesimistik), atau oleh peningkatan investasi swasta 15 persen. Dengan demikian pariwisata dan investasi swasta di Bali sangat berperan sebagai mesin pertumbuhan (*the growth engine*) perekonomian Bali dalam kondisi pengeluaran pemerintah menurun.

3. *Kelompok IV: Pengeluaran Pemerintah dan Wisatawan Meningkatkan*

Jika pengeluaran pemerintah meningkat 15 persen dan pengeluaran wisatawan tetap seperti 1996 (S13), meningkat 5 persen (S14) dan 10 persen (S15), akan menumbuhkan perekonomian Bali masing-masing 0,40 persen, 3,06 persen, dan 5,70 persen menurut harga faktor 1996 (Lampiran 5).

S13 juga berdampak meningkatkan pendapatan rumahtangga yaitu rata-rata 0,41 persen. Di antara lima golongan, golongan rumahtangga (1) memperoleh dampak paling besar, yaitu tumbuh 0,45 persen, lebih tinggi dari pada rata-rata pendapatan rumahtangga (Lampiran 5). Ini menandakan bahwa peningkatan pengeluaran pemerintah adalah bernuansa pemerataan, artinya peningkatan pengeluaran pemerintah secara relatif akan meningkatkan pendapatan golongan rumahtangga berpendapatan lebih rendah. Jika pengeluaran pemerintah meningkat 15 persen dan pengeluaran wisatawan meningkat 5 persen (S14), dan 10 persen (S15), maka pendapatan rumahtangga akan tumbuh 3,06 persen dan 5,70 persen. Membandingkan distribusi pertumbuhan pendapatan antar golongan rumahtangga pada S13, S14 dan S15 dengan menggunakan kriteria Standar Deviasi (SD) atau Koefisien Variasi (KV), maka SD atau KV cenderung semakin kecil. Ini mengindikasikan bahwa jika peningkatan pengeluaran wisatawan juga dibarengi peningkatan pengeluaran pemerintah, maka akan mendorong distribusi pendapatan antar golongan rumahtangga di Bali secara relatif semakin merata.

S13, S14 dan S15 juga berdampak menumbuhkan pendapatan sektor produksi, berturut-turut sebesar 0,72 persen, 2,95 persen dan

5,17 persen. Bila dampak ini diperiksa per sektor, umumnya sektor jasa-jasa (neraca 33-36), dan sektor pertanian dalam arti luas (neraca 9-16) menunjukkan laju pertumbuhan meningkat seiring semakin meningkatnya pengeluaran wisatawan atau kunjungan wisatawan.

Mengamati dampak S13, S14, dan S15 terhadap neraca faktor, neraca rumah tangga dan sektor produksi, maka pengeluaran pemerintah dan wisatawan berdampak meningkatkan kinerja perekonomian Bali.

4. KESIMPULAN DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN

4.1. Kesimpulan

Peningkatan alokasi pengeluaran untuk infrastruktur ekonomi tanpa meningkatkan total pengeluaran pemerintah, berdampak meningkatkan kinerja perekonomian Bali relatif rendah. Sedangkan peningkatan alokasi pengeluaran untuk infrastruktur sosial atau pelayanan umum tanpa meningkatkan total pengeluaran pemerintah, bereskes menurunkan kinerja perekonomian Bali.

Pengeluaran pemerintah untuk pembangunan tetap seperti 1996, tetapi pengeluaran wisatawan atau investasi swasta meningkat, maka berdampak meningkatkan kinerja perekonomian Bali. Dengan demikian, pengeluaran wisatawan atau investasi swasta sangat berperan meningkatkan kinerja perekonomian Bali.

Pengeluaran pemerintah yang menurun dapat dikompensasi oleh pengeluaran wisatawan atau investasi swasta yang meningkat. Dengan demikian, pengeluaran pemerintah bukan satu-satunya sumber pertumbuhan ekonomi, karena pariwisata dalam bentuk pengeluaran wisatawan atau investasi swasta juga berperan sebagai mesin pertumbuhan dalam perekonomian Bali.

Peningkatan pengeluaran wisatawan tanpa dibarengi dengan peningkatan pengeluaran pemerintah, berdampak distribusi pendapatan antar golongan rumah tangga secara relatif semakin kurang merata. Sedangkan, peningkatan pengeluaran wisatawan dibarengi dengan peningkatan pengeluaran pemerintah, berdampak distribusi pendapatan antar golongan rumah tangga secara relatif semakin merata.

Dengan demikian, pemerintah berperan sebagai distributor hasil-hasil pembangunan ekonomi dalam bentuk pengeluaran pemerintah untuk golongan-golongan masyarakat tertinggal.

Pengeluaran pemerintah yang meningkat dan pengeluaran wisatawan meningkat pula, maka berdampak lebih meningkatkan kinerja perekonomian Bali. Dengan demikian, tampak sinergi antara peningkatan pengeluaran pemerintah dan wisatawan dalam mendorong pertumbuhan perekonomian Bali dan pemerataan hasil-hasilnya.

4.2. Implikasi Kebijakan

Pengeluaran pemerintah (termasuk pengeluaran infrastruktur ekonomi) perlu ditingkatkan untuk pemeratakan hasil-hasil pembangunan dan memfasilitasi peningkatan kunjungan wisatawan. Misalnya, (1) menyediakan infrastruktur fisik dan ekonomi yang dapat memperlancar arus transportasi, komunikasi dan informasi, (2) meningkatkan stabilitas keamanan, sehingga memberi rasa aman bagi para wisatawan yang berkunjung ke Bali, (3) meningkatkan penyediaan informasi tentang kepariwisataan Bali, dan sebagainya.

Kepariwisataan di Bali perlu dipertahankan dan bahkan dikembangkan. Namun dalam pengembangannya harus memperhatikan daya dukung wilayah (*carrying capacity*), dan menghindari timbulnya konflik sosial-budaya-religius dengan penduduk setempat. Mengingat peran pengeluaran wisatawan sebagai injeksi dana dalam pembangunan perekonomian Bali, maka pemerintah (pusat maupun daerah) dan pihak swasta yang bergerak di sektor pariwisata, hendaknya merumuskan berbagai kebijakan promosi yang cenderung meningkatkan kedatangan wisatawan ke Indonesia dan Bali khususnya.

Dalam usaha meningkatkan arus investasi modal swasta ke Bali, maka pemerintah daerah perlu menciptakan iklim investasi yang kondusif bagi para investor, misalnya (1) menyediakan fasilitas dan informasi investasi, (2) penyederhanaan perijinan, (3) jaminan keamanan bagi para investor, (4) menyediakan infrastruktur yang memadai, dan sebagainya. Di samping itu, untuk mendorong pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, maka pemerintah daerah perlu lebih mengarahkan penyebaran investasi di luar kabupaten Badung dan Kodya Denpasar.

Strategi pembangunan ekonomi Bali agar tidak bergeser dari basis pariwisata (termasuk jasa-jasa yang terkait dengan pariwisata), pertanian dalam arti luas dan industri kecil/kerajinan. Strategi ini sudah terbukti ampuh mempertahankan perekonomian Bali dari kemerosotan, dalam kondisi perekonomian nasional mengalami resesi.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Anonim. 1994. 'Repelita VI Propinsi Daerah Tingkat I Bali (1994/95-1998/99)'. Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat Bali.
- Anonim. 1997. 'Produk Domestik Regional Bruto Propinsi Daerah Tingkat I Bali 1993-1995 (Jilid I dan II)'. Badan Perencanaan Pemerintah Daerah Tingkat I Bali.
- Arief, S. 1993. 'Dampak Ekonomi Pengeluaran Pemerintah'. Kompas Jumat 22 Januari 1993. Penerbit Gramedia, Jakarta.
- BPS. 1994. 'Sistem Neraca Sosial Ekonomi Indonesia 1990, Jilid I dan II'. Biro Pusat Statistik, Jakarta.
- Budiyanti, R. and D.F. Schreiner. 1991. 'Income Distribution Analysis for Rural Central Java: An Application of Social Accounting Methodology'. Dalam Jurnal Agroekonomi, JAE. Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian, Badan Litbang. Pertanian, Departemen Pertanian. 10 (1, 2): 91-107.
- Erawan, N. 1994. 'Pariwisata dan Pembangunan Ekonomi (Bali sebagai kasus)'. Upada Sastra, Denpasar.
- King, B.B. 1985. 'What Is a SAM?'. In A World Bank Symposium Social Accounting Matrices A Basic for Planning (edited by Pyatt, G and J.I. Round). The World Bank, Washington, D.C., U.S.A. pp. 17-51.
- Pyatt, G. and J.I. Round. 1985. 'Accounting and Fixed-Price Multiplier in a Social Accounting Matrix Framework'. In A World Bank Symposium Social Accounting Matrices A Basic for Planning (edited by Pyatt, G and J.I. Round). The World Bank, Washington, D.C., U.S.A. pp.186-206.
- Ratnawati, A. 1996. 'Dampak Kebijakan Tarif Impor dan Pajak Ekspor Terhadap Kinerja Perekonomian, Sektor Pertanian dan Distribusi

Pendapatan di Indonesia: Suatu Pendekatan Model Keseimbangan Umum'. Disertasi Program Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor.

Sutomo, S. 1995. 'Kemiskinan dan Pembangunan Ekonomi Wilayah: Analisis Sistem Neraca Sosial Ekonomi'. Disertasi Doktor pada Program Pascasarjana Institut Pertanian Bogor.

Thorbecke, E. 1985. 'The Social Accounting Matrix and Consistency-Type Planning Model'. In A World Bank Symposium Social Accounting M (edited by Pyatt, G and J.I. Round). The World Bank, Wahington, D.C., U.S.A. pp 207-256.

Wuryanto, L.E. 1996. 'Fiscal Decentralization and Economic Performance in Indonesia: An Interregional Computable General Equilibrium Approach'. A Dissertation of Doctor of Philosophy at Cornell University (Unpublished).



Lampiran 1.
Dampak Perubahan Alokasi Pengeluaran Pemerintah untuk
Infrastruktur atau Pelayanan Umum Terhadap Pertumbuhan dan Distribusi
Pendapatan Neraca Regional Bali, 1996

No	Neraca	S1 (%)	S2 (%)	S3 (%)
	Faktor Produksi :			
1	Tenagakerja	0,05	-0,03	-0,05
2	Modal	0,05	-0,03	-0,06
	Rataan Pertumbuhan (1-2)	0,05	-0,03	-0,055
	Rumahtangga (golongan pengeluaran):			
3	<Rp 100.000 (1)	0,05	-0,03	-0,05
4	Rp 100.000-299.999 (2)	0,05	-0,03	-0,05
5	Rp 300.000-499.999 (3)	0,05	-0,03	-0,05
6	Rp 500.000-749.999 (4)	0,05	-0,03	-0,05
7	≥ Rp750.000 (5)	0,05	-0,03	-0,05
	Rataan Pertumbuhan (3-7)	0,05	-0,03	-0,05
8	Perusahaan	0,05	-0,03	-0,06
	Sektor Produksi :			
9	Padi	0,05	-0,03	-0,05
10	Jagung	0,03	-0,01	-0,04
11	Tanaman Umbi - umbian	0,03	-0,01	-0,04
12	Sayur-sayuran	-0,02	0,00	0,07
13	Buah-buahan	-0,04	0,00	0,12
14	Kacang Tanah	0,07	-0,04	-0,06
15	Kacang Kedelai	0,05	-0,03	-0,05
16	Tan. Pangan lainnya	0,04	-0,02	-0,05
	Rataan Pertbhn.Tan.Pangan (9-16)	0,03	-0,02	-0,01
17	Kelapa	0,23	-0,15	-0,17
18	Tembakau	0,01	0,00	-0,01
19	Kopi	0,55	-0,38	-0,38
20	Tan.Perkebunan lainnya	0,40	-0,27	-0,29
	Rataan Pertbhn. Perkebunan (17-20)	0,30	-0,20	-0,21
21	Peternakan dan Hasil lainnya	0,11	-0,07	0,09
22	Kebutanan dan Hasil lainnya	0,01	0,22	-0,42
23	Perikanan dan Hasil-hasilnya	0,03	-0,02	-0,04
	Rataan Pertbhn.Pertanian (9-23)	0,10	-0,05	-0,10
24	Pertambangan dan Penggalian	0,92	-0,38	-1,40
25	Ind.Mak.,Min dan Tembakau	0,94	-0,02	-0,04
26	Ind.Permintek.,Pak dan Kulit	0,02	-0,01	-0,03
27	Ind.Kayu dan sejenisnya	0,11	-0,01	-0,27
28	Ind. Kertas dan sejenisnya	-1,36	1,51	-0,43
29	Ind Kimia/semen dan sejenisnya	0,14	-0,05	-0,23
30	Ind.Alat Angk.& Barang Logam	-0,09	-0,03	0,31
31	Listrik, Gas dan Air Minum	0,04	-0,02	-0,05
32	Bangunan dan Konstruksi	1,13	-0,47	-1,73
33	Perdg.,Hotel dan Restoran	0,02	-0,01	-0,04
34	Trasp.,Pos dan Telekom.	0,03	-0,02	0,04
35	Kuangan (Bank, Non Bank)	0,12	-0,05	-0,16
36	Persewaan Bangn.,Pemthn.,dan jasa	-0,13	0,03	0,26
	Rataan Pertumbuhan (9-36)	0,09	-0,01	-0,19

Catatan:

- S1 = Pengeluaran pemerintah dan wisatawan tetap seperti 1996, hanya alokasi untuk infrastruktur ekonomi +15%
- S2 = Pengeluaran pemerintah dan wisatawan tetap seperti 1996, hanya alokasi untuk infrastruktur sosial +15%
- S3 = Pengeluaran pemerintah dan wisatawan tetap seperti 1996, hanya alokasi untuk pelayanan umum +15%

Lampiran 2.

Dampak Pengeluaran Pemerintah tetap seperti 1996, tetapi Pengeluaran Wisatawan Meningkatkan 5% dan 10%, atau Investasi Swasta Meningkatkan 15% Terhadap Pertumbuhan dan Distribusi Pendapatan Neraca Regional Bali, 1996

No	Neraca	S4 (%)	S5 (%)	S6 (%)
	Faktor Produksi :			
1	Tenagakerja	2,64	5,27	1,76
2	Modal	2,68	5,36	1,26
	Rataan Pertumbuhan (1-2)	2,66	5,32	1,51
	Rumahtangga (golongan pengeluaran):			
3	<Rp 100.000 (1)	2,64	5,28	1,71
4	Rp 100.000-299.999 (2)	2,65	5,31	1,41
5	Rp 300.000-499.999 (3)	2,65	5,31	1,41
6	Rp 500.000-749.999 (4)	2,64	5,29	1,49
7	≥ Rp750.000 (5)	2,64	5,28	1,43
	Koefisien Variasi (KV)	0,21	0,29	8,54
	Rataan Pertumbuhan (3-7)	2,644	5,29	1,49
8	Perusahaan	2,68	5,35	1,27
	Sektor Produksi:			
9	Padi	2,60	5,20	1,18
10	Jagung	2,31	4,63	0,45
11	Tanaman Umbi-umbian	2,30	4,61	0,44
12	Sayur-Sayuran	3,04	6,09	1,36
13	Buah-Buahan	2,93	5,85	1,66
14	Kacang Tanah	2,47	4,94	1,01
15	Kacang Kedelai	2,61	5,22	1,24
16	Tan. Pangan lainnya	2,51	5,02	0,89
	Rataan Pertbhn.Tan.Pangan (9-16)	2,60	5,19	1,02
17	Kelapa	2,51	5,03	1,01
18	Tembakau	0,45	0,91	0,24
19	Kopi	2,60	5,19	1,40
20	Tan.Perkebunan lainnya	2,34	4,69	1,15
	Rataan Pertbhn. Perkebunan (17-20)	1,98	3,95	0,95
21	Peternakan dan Hasil lainnya	2,32	4,64	1,02
22	Kehutanan dan Hasil-hasilnya	2,48	4,96	1,94
23	Perikanan dan Hasil-hasilnya	1,85	3,70	0,73
	Rataan Pertbhn.Pertanian (9-23)	2,25	4,49	1,05
24	Pertambangan dan Penggalian	0,39	0,78	9,18
25	Ind.Mak.,Min dan Tembakau	2,54	5,08	0,89
26	Ind.Permintek.,Pak dan Kulit	1,24	2,48	2,35
27	Ind.Kayu dan sejenisnya	3,95	7,90	1,90
28	Ind. Kertas dan sejenisnya	2,54	5,07	1,30
29	Ind Kimia/semen dan sejenisnya	1,96	3,93	3,80
30	Ind.Alat Angk.&barang logam	1,52	3,05	6,40
31	Listrik, Gas dan Air Minum	2,50	5,00	1,29
32	Bangunan dan Konstruksi	0,16	0,32	11,13
33	Perdgn.,Hotel dan Restoran	2,24	4,48	0,27
34	Trasp.,Pos dan Telekom.	3,58	7,15	0,30
35	Keuangan (Bank, Non Bank)	3,08	6,15	1,09
36	Persewaan Bangn.,Pemthn.,dan jasa	3,16	6,32	1,97
	Rataan Pertumbuhan (9-36)	2,22	4,44	2,06

Catatan:

- S4 = Pengeluaran pemerintah tetap seperti 1996 dan pengeluaran wisatawan meningkat 5%
- S5 = Pengeluaran pemerintah tetap seperti 1996 dan pengeluaran wisatawan meningkat 10%
- S6 = Pengeluaran pemerintah tetap seperti 1966 dan pengeluaran dan investasi swasta meningkat 15%

Lampiran 3.

Dampak Pengeluaran Pemerintah Menurun 15%, tetapi Pengeluaran Wisatawan tetap seperti 1996 dan meningkat 5%, atau Investasi Swasta Meningkat 10% Terhadap Pertumbuhan dan Distribusi Pendapatan Neraca Regional Bali, 1996

No	Neraca	S7 (%)	S8 (%)	S9 (%)
	Faktor Produksi:			
1	Tenagakerja	-0,46	2,17	0,71
2	Modal	-0,34	2,34	0,50
	Rataan Pertumbuhan (1-2)	-0,40	2,25	0,60
	Rumahtangga (golongan pengeluaran):			
3	<Rp 100.000 (1)	-0,45	2,18	0,69
4	Rp 100.000-299.999 (2)	-0,39	2,27	0,56
5	Rp 300.000-499.999 (3)	-0,39	2,27	0,55
6	Rp 500.000-749.999 (4)	-0,41	2,23	0,59
7	≥ Rp750.000 (5)	-0,41	2,23	0,55
	Rataan Pertumbuhan (3-7)	-0,41	2,24	0,59
8	Perusahaan	-0,34	2,33	0,50
	Sektor Produksi:			
9	Padi	-0,33	2,27	0,46
10	Jagung	-0,13	2,19	0,17
11	Tanaman Umbi-umbian	-0,12	2,18	0,18
12	Sayur-Sayuran	-0,37	2,67	0,54
13	Buah-Buahan	-0,46	2,47	0,65
14	Kacang Tanah	-0,31	2,16	0,37
15	Kacang Kedelai	-0,35	2,26	0,48
16	Tan. Pangan lainnya	-0,25	2,26	0,35
	Rataan Pertbhn.Tan.Pangan (9-16)	-0,29	2,31	0,40
17	Kelapa	-0,38	2,13	0,29
18	Tembakau	-0,07	0,39	0,10
19	Kopi	-0,67	1,92	0,26
20	Tan.Perkebunan lainnya	-0,46	1,88	0,31
	Rataan Pertbhn. Perkebunan (17-20)	-0,39	1,58	0,24
21	Peternakan dan Hasil-hasilnya	-0,38	1,94	0,31
22	Kehutanan dan Hasil-hasilnya	-0,95	1,53	0,35
23	Perikanan dan Hasil-hasilnya	-0,21	1,64	0,28
	Rataan Pertbhn.Pertanian (9-23)	-0,44	1,80	0,32
24	Pertambangan dan penggalian	-2,43	-2,04	3,69
25	Ind.Mak.,Min dan Tembakau	-0,25	2,30	0,35
26	Ind.Permintek.,Pak dan Kulit	-0,19	1,05	1,38
27	Ind.Kayu dan sejenisnya	-0,51	3,44	0,76
28	Ind. Kertas dan sejenisnya	-0,86	1,67	0,00
29	Ind Kimia/semen dan sejenisnya	-0,57	1,39	1,96
30	Ind.Alat Angk.&barang logam	-0,52	1,00	3,75
31	Listrik, Gas dan Air Minum	-0,40	2,10	0,45
32	Bangunan dan Konstruksi	-2,98	-2,82	0,44
33	Perdg.,Hotel dan Restoran	-0,07	2,16	0,11
34	Trasp.,Pos dan Telekom.	-0,09	3,48	0,11
35	Keuangan (Bank, Non Bank)	-0,31	2,77	0,42
36	Persewaan Bangn.,Pemlhn.,dan jasa	-0,52	2,63	0,79
	Rataan Pertumbuhan (9-36)	-0,77	1,49	1,04

Catatan:

S7 = Pengeluaran pemerintah menurun 15 % dan pengeluaran wisatawan tetap seperti 1996

S8 = Pengeluaran pemerintah menurun 15% dan pengeluaran wisatawan meningkat 5%

S9 = Pengeluaran pemerintah menurun 15% dan Investasi swasta meningkat 10%

Lampiran 4.

Dampak Pengeluaran Pemerintah Menurun 30%, tetapi Pengeluaran Wisatawan tetap seperti 1996 dan Meningkatkan 5%, atau Investasi Swasta Meningkatkan 15% Terhadap Pertumbuhan dan Distribusi Pendapatan Neraca Regional Bali, 1996

No	Neraca	S10 (%)	S11 (%)	S12 (%)
	Faktor Produksi:			
1	Tenagakerja	-0,92	1,71	0,84
2	Modal	-0,68	2,00	0,58
	Rataan Pertumbuhan (1-2)	-0,80	1,85	0,71
	Rumahtangga (golongan pengeluaran):			
3	<Rp 100.000 (1)	-0,90	1,73	0,81
4	Rp 100.000-299.999 (2)	-0,77	1,88	0,64
5	Rp 300.000-499.999 (3)	-0,77	1,88	0,63
6	Rp 500.000-749.999 (4)	-0,82	1,82	0,67
7	≥ Rp750.000 (5)	-0,81	1,82	0,61
	Rataan Pertumbuhan (3-7)	-0,81	1,83	0,67
8	Perusahaan	-0,68	1,99	0,59
	Sektor Produksi:			
9	Padi	-0,65	1,95	0,53
10	Jagung	-0,25	2,06	0,20
11	Tanaman Umbi-umbian	-0,25	2,06	0,20
12	Sayur-Sayuran	-0,75	2,30	0,62
13	Buah-Buahan	-0,92	2,01	0,75
14	Kacang Tanah	-0,61	1,86	0,40
15	Kacang Kedelai	-0,70	1,91	0,55
16	Tan. Pangan lainnya	-0,49	2,02	0,40
	Rataan Pertbhn.Tan.Pangan (9-16)	-0,41	2,02	0,46
17	Kelapa	-0,77	1,75	0,25
18	Tembakau	-0,14	0,32	0,11
19	Kopi	-1,35	1,25	0,05
20	Tan.Perkebunan lainnya	-0,92	1,42	0,23
	Rataan Pertbhn. Perkebunan (17-20)	-0,79	1,18	0,16
21	Peternakan dan Hasil-hasilnya	-0,72	0,60	0,27
22	Kehutanan dan Hasil-hasilnya	-1,90	0,58	0,05
23	Perikanan dan Hasil-hasilnya	-0,41	1,44	0,32
	Rataan Pertbhn.Pertanian (9-23)	-0,85	1,36	0,25
24	Pertambangan dan Penggalan	-4,86	-4,47	4,32
25	Ind.Msk.,Min dan Tembakau	-0,49	2,05	0,40
26	Ind.Permintek.,Pak dan Kulit	-0,37	0,86	1,97
27	Ind.Kayu dan sejenisnya	-1,01	2,94	0,89
28	Ind. Kertas dan sejenisnya	-1,73	0,81	-0,43
29	Ind Kimia/semen dan sejenisnya	-1,15	0,82	2,65
30	Ind.Alat Angk.&barang logam	-1,04	0,49	5,36
31	Listrik, Gas dan Air Minum	-0,80	1,70	0,48
32	Bangunan dan Konstruksi	-5,96	-5,80	5,17
33	Perdg.,Hotel dan Restoran	-0,15	2,09	0,12
34	Trasp.,Pos dan Telekom.	-0,19	3,39	0,11
35	Keuangan (Bank, Non Bank)	-0,62	2,46	0,47
36	Persewaan Bangn.,Pemihn.,dan Jasa	-1,05	2,11	0,92
	Rataan Pertumbuhan (9-36)	-1,45	0,77	1,62

Catatan:

S10 = Pengeluaran pemerintah menurun 30% dan pengeluaran wisatawan tetap seperti 1996

S11 = Pengeluaran pemerintah menurun 30% dan pengeluaran wisatawan meningkat 5%

S12 = Pengeluaran pemerintah menurun 30% dan investasi swasta meningkat 15%

Lampiran 5.

Dampak Pengeluaran Pemerintah Meningkatkan 15% dan Pengeluaran Wisatawan tetap Seperti 1996, Meningkatkan 5% dan 10% Terhadap Pertumbuhan dan Distribusi Pendapatan Neraca Regional Bali, 1996

No	Neraca	S13 (%)	S14 (%)	S15 (%)
	Faktor Produksi :			
1	Tenagakerja	0,46	3,10	5,74
2	Modal	0,34	3,02	5,70
	Rataan Pertumbuhan (1 – 2)	0,40	3,06	5,72
	Rumahtangga (golongan pengeluaran):			
3	<Rp 100.000 (1)	0,45	3,09	5,73
4	Rp 100.000-299.999 (2)	0,39	3,04	5,70
5	Rp 300.000-499.999 (3)	0,39	3,04	5,70
6	Rp 500.000-749.999 (4)	0,41	3,06	5,70
7	≥ Rp750.000 (5)	0,41	3,05	5,68
	Koefisien Variasi (KV)	5,98	0,68	0,31
	Rataan Pertumbuhan (3-7)	0,41	3,06	5,70
8	Perusahaan	0,34	3,02	5,70
	Sektor Produksi:			
9	Padi	0,33	2,93	5,53
10	Jagung	0,13	2,44	4,75
11	Tanaman Umbi – umbian	0,12	2,43	4,73
12	Sayur-Sayuran	0,37	3,42	6,46
13	Buah-Buahan	0,46	3,39	6,31
14	Kacang Tanah	0,31	2,78	5,52
15	Kacang Kedelai	0,35	3,96	5,57
16	Tan. Pangan lainnya	0,25	2,78	5,26
	Rataan Pertbhn.Tan.Pangan (9-16)	0,29	3,02	5,46
17	Kelapa	0,36	2,90	5,41
18	Tembakau	0,07	0,52	0,96
19	Kopi	0,07	3,27	5,87
20	Tan.Perkebunan lainnya	0,46	2,81	5,16
	Rataan Pertbhn. Perkebunan (17-20)	0,39	2,37	4,35
21	Peternakan dan Hasil lainnya	0,38	2,70	
22	Kehutanan dan Hasil lainnya	0,95	3,43	5,02
23	Perikanan dan Hasil-hasilnya	0,21	2,06	5,91
	Rataan Pertbhn.Pertanian (9-23)	0,44	2,72	3,91
24	Pertambangan dan Penggalian	2,43	2,82	4,93
25	Ind.Mak.,Min dan Tembakau	0,25	2,79	3,21
26	Ind.Permintek.,Pak dan Kulit	0,19	1,43	5,33
27	Ind.Kayu dan sejenisnya	0,51	4,46	2,67
28	Ind. Kertas dan sejenisnya	0,86	3,40	6,41
29	Ind Kimia/semen dan sejenisnya	0,57	2,54	5,94
30	Ind.Alat Angk. & Barang Logam	0,52	2,04	4,50
31	Listrik, Gas dan Air Minum	0,40	2,90	3,57
32	Bangunan dan Konstruksi	2,98	3,14	5,40
33	Perdg.,Hotel dan Restoran	0,07	2,31	3,30
34	Trasp.,Pos dan Telekom.	0,09	3,67	4,55
35	Keuangan (Bank, Non Bank)	0,31	3,39	7,24
36	Persewaan Bangn.,Pemthn.,dan jasa	0,52	3,68	6,46
	Rataan Pertumbuhan (9 – 36)	0,72	2,95	6,84
				5,17

Catatan :

S13 = Pengeluaran pemerintah meningkat 15% dan pengeluaran wisatawan tetap seperti 1996

S14 = Pengeluaran pemerintah meningkat 15% dan pengeluaran wisatawan meningkat 5%

S15 = Pengeluaran pemerintah meningkat 15% dan pengeluaran wisatawan meningkat 10% ■